

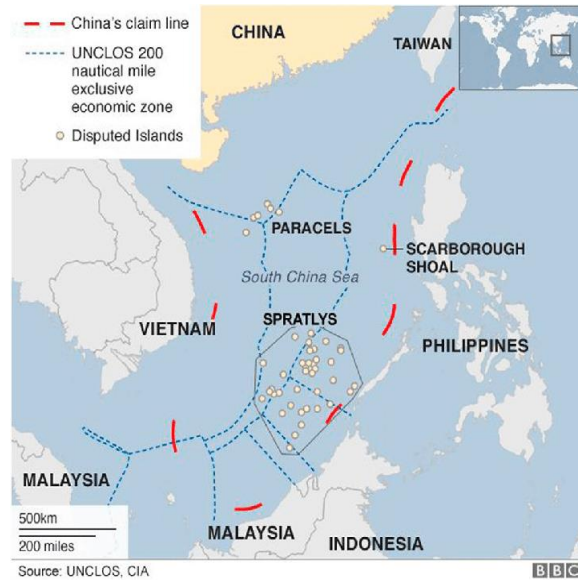
**SOFT DIPLOMACY INDONESIA MENYIKAPI ANCAMAN KEAMANAN OLEH
PENGARUH KLAIM TIONGKOK DI WILAYAH NINE-DASHED LINE
TAHUN 2012-2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kompleksitas kepentingan di lingkup regional secara umum dapat memicu perpecahan serta ketidakstabilan dalam banyak aspek. Perselisihan yang dipicu oleh kepentingan politik ekonomi, hingga sosial apabila tidak ditangani secara bijak dan terarah, dapat berujung terjadinya konflik yang melibatkan kekuatan pertahanan sekelompok pihak yang merasa kepentingan internal mereka terusik. Demikian halnya dengan perkembangan konflik klaim tumpang tindih wilayah teritori di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara sendiri merupakan jalur perairan pesisir yang menjadi bagian dari Samudera Pasifik yang terbentang Dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan yang potensi sumber daya alam yang besar khususnya sebagai jalur distribusi minyak dan perdagangan maritim.

Kawasan Laut Natuna Utara meliputi perairan dan daratan dari dua gugusan pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta tepian Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Pada gambar tersebut juga terdapat 9 garis putus-putus yang mana garis imajiner tersebut adalah serangkaian petunjuk batas pemisah wilayah klaim kedaulatan Tiongkok yang melingkupi sekitar 90% dari wilayah LCS yang bersinggungan dengan territorial dari 4 negara anggota ASEAN yakni Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Dilihat dari 9 garis putus-putus yang tertera pada peta, sebagian perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah milik Tiongkok, dimana isu tersebut menjadi hal yang telah lama dipertanyakan oleh Indonesia namun tak kunjung mendapat tanggapan yang konsisten.



Gambar 1.1 Peta yang memperlihatkan 9 garis putus-putus Tiongkok sekaligus wilayah teritorial negara-negara ASEAN di area Kepulauan Natuna.¹

Tiongkok mencetuskan klaim atas dasar historis, penemuan situs, dan peta tradisional dari jalur navigasi nelayan pribumi tiongkok. Sengketa teritorial ini diawali oleh klaim Tiongkok atas kepulauan Spratly dan Paracel pada 1974-1992 yang disertai penempatan pasukan sehingga Tiongkok membebaskan warga negaranya untuk berlayar di atas perairan itu. (Simanjuntak, 2020)

Pembahasan Laut Natuna Utara ini tidak berhenti pada sengketa hak kedaulatan atas kepemilikan saja, tetapi juga berkaitan dengan masalah hak berdaulat atas Landas Kontinen dan ZEE, keamanan navigasi, serta penggunaan alat pertambangan yang melanggar teritorial nasional. Hukum laut internasional menyatakan bahwa kepulauan Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia yang mengelilingi garis pangkal laut ZEE Indonesia sejauh 200 mil. Namun, berbagai ketidaksesuaian muncul selama proses penafsiran, pengembangan, dan penerapan hukum laut internasional ini, yang kemudian mengakibatkan sejumlah kesalahpahaman di antara para pihak yang bersengketa. Selama berlangsungnya proses pengelolaan konflik, kerap kali menimbulkan hambatan yang umumnya dipicu oleh aksi operasi pertahanan, pelayaran illegal, serta perbedaan perspektif dan motif dari beberapa anggota ASEAN selama perundingan berlangsung.

¹ Peta pada gambar 1.1 bersumber dari: <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/south-china-sea-claims3.gif>, pada 6 Juni 2023 pukul 18:00 WIB

Meski Tiongkok telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Tiongkok tetap mempertahankan klaimnya atas wilayah yang disengketakan itu. Adapun konflik antarnegara atas perebutan kepemilikan atas kepulauan pertama kali terjadi di dasawarsa 1970, yang kemudian berulang kembali di dasawarsa 80, 90 hingga 2010. (Nainggolan, 2013)

Aksi provokasi dan manuver-manuver militer dari kawasan perairan yang konfliktual ini terus mengalami peningkatan, dan bahkan mengarah pada terciptanya konflik berskala rendah atau *low intensity conflict* namun juga tak menutup kemungkinan dapat menjadi konflik bersenjata berintensitas tinggi (*high intensity conflict*) apabila resolusi konflik yang kongkrit gagal dicapai, mengingat besarnya kepentingan baik negara yang mengklaim maupun tidak, serta negara luar kawasan (dkk, 2020)

Indonesia menempatkan diri di posisi *non-claimant state* dalam sengketa ini dan berfokus dalam menjembatani negara ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Sikap Indonesia di awal munculnya klaim Tiongkok atas wilayah Laut Natuna Utara adalah dengan *soft power*, yaitu menghindari adanya ketegangan yang meningkat di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan tidak menganggap persoalan batas wilayah Indonesia dengan Tiongkok ini menjadi sebuah sengketa.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pentingnya kewilayahan laut khususnya wilayah Natuna bagi Indonesia, yang berkaitan dengan aspek stabilitas, hukum, serta posisi Indonesia dalam zona geopolitik. Area maritim ini telah menjadi pusat perekonomian yang krusial. Produktivitas yang tinggi membuat Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina telah menjadikan stabilitas dan keamanan menjadi prioritas utama di Laut Natuna Utara. Negara-negara itu terus-menerus bersaing untuk memperebutkan kepentingan geopolitik seperti control kepemilikan atas pulau, atoll, serta terumbu karang sehingga mencegah ketegangan konflik terus meningkat telah menjadi keinginan bersama khususnya Indonesia-ASEAN *claimant countries*.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari *soft diplomacy* Indonesia dalam penanggulangan konflik Nine-Dashed Line di Laut Natuna Utara?

C. Kerangka Pemikiran

1. Diplomasi

Diplomasi, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Soelhi, memiliki beberapa definisi. Pertama, menurut Lord Strang, diplomasi berarti bidang kerja yang terkait hubungan luar negeri atau pelaksanaan politik luar negeri.

Harold Nicolson dalam bukunya “Diplomacy” memberikan definisi diplomasi sebagai pengelolaan hubungan internasional melalui sarana negosiasi. Kemudian menurut Rivier, diplomasi mencakup tiga hal sebagai berikut: 1. Diplomasi adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana mengelola hubungan antarbangsa melalui para wakilnya yang ahli dalam taktik dan strategi berunding. 2. Diplomasi adalah seni mengekspresikan gagasan secara dialog oleh wakil-wakil negara kepada mitra tertentu, termasuk kementerian luar negeri dan setiap lembaga politik, yang mencakup segala bentuk permasalahan hubungan antarbangsa. (Fitra Deni, 2017)

Adapun strategi soft diplomacy berdasarkan penelitian ini, yaitu menyingkirkan segala bentuk ketegangan yang meningkat di kawasan Laut Tiongkok Selatan ini bersifat menimbulkan efek pencegahan akan meningkatnya konflik antar kepentingan di kawasan. Pencegahan yang dimaksud dan dibahas dalam penelitian ini bersifat diplomatis, dengan berfokus pada terciptanya konsensus bersama serta meminimalisir penggunaan ancaman terhadap antar pihak sehingga mencegah konflik meningkat lebih tinggi.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari konflik Laut Natuna Utara karena wilayah ZEE Indonesia di wilayah natuna masuk dalam peta klaim Tiongkok. Oleh karena itu Indonesia berupaya mencegah dan merumuskan strategi penyelesaian terkait konflik Laut Natuna Utara yang dianggap mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional serta mendorong negara ASEAN untuk menentukan sudut pandang yang sama terhadap konflik Laut Natuna Utara. Berdasarkan konteks tersebut, maka dalam kasus sengketa di area Nine-Dashed Line Tiongkok, konsep ini akan digunakan untuk melihat bagaimana strategi Indonesia terhadap konflik klaim wilayah Laut Natuna Utara.

Keamanan Laut Natuna Utara sendiri merupakan masalah strategis yang tumbuh bersama dengan kemajuan kawasan Asia Pasifik secara dinamis. Situasi yang ada menunjukkan bahwa kawasan Kepulauan Natuna menjadi semakin penting, baik dari sisi letak geografis, ekonomi politik hingga pertahanan keamanan. Adapun pihak yang terlibat klaim langsung atas kepulauan

Natuna terdiri dari Malaysia, Philipina, Vietnam, Brunei dan non-Claimant state (bukan negara penggugat klaim dari Laut Natuna Utara) yakni Indonesia.

Terdapat dua pilar penting yang digunakan Indonesia dan ASEAN sebagai upaya mitigasi konflik Laut Natuna Utara yakni membangun kepercayaan antar pihak (confidence building measure) serta perjanjian persahabatan dan kerja sama. Inisiasi tersebut menjadi upaya dalam rangka mendorong terciptanya sistem penyelesaian sengketa. Inisiatif Indonesia dalam upaya menangani sengketa ini menempatkan Indonesia pada posisi penting di kawasan. Dalam perkembangannya, posisi Indonesia untuk menyelesaikan konflik Laut Natuna Utara pun menghadapi tantangan yang cukup keras.

Akibat meningkatnya ketegangan antar negara anggota ASEAN dengan sejumlah negara besar di Asia, Laut Natuna Utara yang menjadi poros geopolitik di kawasan Asia Pasifik telah menjadi topik berskala internasional. Inti dari masalah yang diperdebatkan sebenarnya adalah klaim wilayah perbatasan (territorial zone). Isu Laut Natuna Utara secara signifikan berdampak pada gelombang polarisasi kekuatan antara negara-negara yang bersaing. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghindari potensi konflik. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian terkait sengketa maritim di Laut Natuna Utara.

Indonesia secara konsisten berpartisipasi aktif dalam upaya penyelesaian konflik dengan selalu mewaspadai situasi keamanan di Laut Natuna Utara yang rentan untuk menjadi titik persoalan oleh beberapa negara di zona konflik kawasan ini sehingga dapat berdampak terhadap keamanan ekonomi kawasan. Letak Indonesia juga strategis dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang mana merupakan salah satu rute ekonomi utama dunia, khususnya ekspor dan impor Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah semestinya Indonesia perlu menentukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. (Alfath, 2017)

Sebagaimana prinsip dari diplomasi Indonesia yakni penyelesaian konflik dengan menghindari adanya ketegangan yang meningkat di kawasan Laut Tiongkok Selatan karena pada dasarnya Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang harmonis dan kerja sama bilateral yang strategis khususnya bidang perdagangan. Adapun strategi Indonesia dalam

menjalin kerja sama baik dengan Tiongkok dengan Claimant state yang bersamaan dengan klaim Tiongkok atas Laut Natuna Utara, diantaranya:

- a. **Seminar MPCSCS** (Managing Potential Conflicts in South China Sea) yang digelar pada tahun 1988 memiliki 3 tujuan yakni: membuat program kerjasama, mendorong komunikasi antar pihak yang berselisih, dan menyebarkan prinsip Confidence Building Measures (CBMs). Agenda tersebut menginstruksikan negara-negara di sekitar Laut Natuna Utara untuk saling berkolaborasi dan mengoordinasikan kebijakan mereka tentang pengelolaan sumber daya hayati, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, dan membuka peluang untuk melibatkan pihak atau organisasi lain yang berkepentingan untuk bekerja sama. Seminar ini telah berhasil meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kecurigaan diantara negara yang berkonflik, mendorong adanya pertukaran informasi dan pandangan serta mengadakan kerjasama dalam pemanfaatan potensi alam di LCS untuk pertama kalinya.
- b. **Smart Maritime Diplomacy.** (a) mengkomunikasikan secara transparan mengenai komitmen Indonesia untuk menegakkan hak berdaulat di Laut Natuna Utara, (b) membuat kerangka kerja strategis dengan negara-negara ASEAN untuk memberikan reaksi yang kuat terhadap potensi akan upaya koersif Tiongkok, serta (c) meningkatkan kolaborasi kelembagaan baik dengan negara tetangga maupun diluar kawasan untuk mengoordinasikan respon dalam menghadapi tindakan agresif Tiongkok di Laut Natuna Utara, (d) menawarkan resolusi konflik sesuai hukum Internasional. (Anugerah, 2021)
- c. **Belt and Road Initiative**

Adapun persepsi Indonesia terhadap Tiongkok memang cenderung beragam, Politik dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang luar biasa, dan sikap negara tersebut terhadap ASEAN khususnya dalam mempengaruhi pandangan para elit politik Indonesia terhadap Tiongkok. Lambat laun, Indonesia mulai melirik model pembangunan ekonomi Tiongkok sehingga menimbulkan persepsi yang lebih jernih. Mungkin perkembangan ini juga dipengaruhi oleh soft power dan kebijakan publik Tiongkok dalam pendekatannya ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara pada awal tahun 2000-an. Akibatnya semakin banyak orang Indonesia memandang Tiongkok sebagai entitas yang berkembang sehingga menyambutnya sebagai alternatif kemitraan mereka disamping Amerika Serikat dan Eropa.

Politik Luar Negeri Indonesia menganut asas kebebasan, Indonesia berupaya untuk mempererat hubungan tidak hanya dengan anggota ASEAN, tapi juga dengan Tiongkok di sejumlah bidang. Maka dari itu, Indonesia mewujudkan kerja sama untuk kepentingan nasionalnya melalui BRI atau Belt and Road Initiative. Indonesia menyambut proyek BRI yang dibiayai dan dibangun oleh Tiongkok secara antusias. Proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi untuk mencapai tujuan maritimnya dengan upayanya untuk meningkatkan infrastruktur darat dan laut.

2. Teori Peran

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori peran (role theory) milik Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja. Teori peran merupakan teori yang berusaha untuk menganalisis suatu posisi yang dijalankan oleh seorang aktor politik. Mochtar Mas' oed menyatakan bahwa peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.

Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu system sehingga Pada studi kasus ini, Indonesia diposisikan sebagai subjek individu tersebut yang berperan penting dalam system internasional dengan merumuskan berbagai kebijakan umum, menuntut suatu komitmen, memberikan norma, pedoman, dan standar berdasarkan hukum internasional yang berlaku dengan harapan dapat disepakati oleh segala pihak dalam sistem internasional pada umumnya dan sistem regional pada khususnya. (Wish, 1980)

Holsti (1970) dalam literturnya juga menjelaskan peran tingkat status atau pengaruh yang lebih kecil. Ini biasanya melibatkan bekerja dengan negara lain dalam kemitraan status yang sama. Contoh peran ini adalah kolaborator subsistem regional, mediator-integrator, dan jembatan. Seperti halnya dalam kasus ini, fokusnya terletak pada peran Indonesia yang tingkat status atau pengaruhnya lebih kecil sementara Tiongkok cenderung memegang otoritas terbesar sebagai penentu keputusan. Indonesia dalam hal ini mengambil strategi *shuttle diplomacy* dengan menjadi kolaborator subsistem regional, mediator-integrator, dan penengah konflik dengan melibatkan negara lain dalam kemitraan status yang sama, serta memfasilitasi berbagai

agenda kerjasama sebagai platform bersama bagi ASEAN untuk merundingkan penyelesaian konflik.

D. Hipotesis

Stabilitas dan ketertiban keamanan kawasan menjadi prioritas utama Indonesia serta negara-negara besar di ASEAN yang berkepentingan, Indonesia telah menempuh berbagai langkah dan proses yang berkala.

1. Indonesia menjadi mediator terhadap pihak yang bersengketa untuk menyepakati langkah penyelesaian konflik dengan berbasis ASEAN Way serta hukum laut internasional (UNCLOS 1982)
2. Dalam pelaksanaan diplomasi, Indonesia memanfaatkan hubungan strategisnya dengan Tiongkok dan negara penggugat lainnya secara kolektif

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang ditemukan, maka terbentuk tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan dinamika interaksi antar negara di Kawasan Nine-Dashed Line
2. Menganalisa kebijakan strategis Indonesia terhadap status tingkatan konflik kedaulatan di kawasan ini.
3. Mendeskripsikan strategi soft diplomacy Indonesia-ASEAN dalam merespon konflik sengketa kedaulatan guna mencapai kepentingan kawasan secara umum dan kepentingan nasional secara khusus.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian mengacu pada pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif sebagai instrumen untuk menjelaskan suatu kasus secara mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yakni studi kepustakaan dari kumpulan dokumen yang diakses dari situs berita internasional, jurnal, buku, laporan, konten audiovisual, dan beberapa sumber/platform pendukung lainnya.

Sementara itu, sifat penelitian ini adalah eksplanatif. Studi eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan informasi deskriptif. Dengan memaparkan penjelasan yang merujuk pada pertanyaan “bagaimana”. Dengan begitu, dapat pula teridentifikasi alasan suatu fenomena terjadi. Sifat penelitian eksplanatif berusaha mencari penyebab dan alasan, serta memberikan bukti untuk mendukung atau menyangkal penjelasan atau prediksi. Hal ini dilakukan untuk menemukan beberapa hubungan antara berbagai aspek fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan pembahasan masing-masing bab yang dibahas secara terperinci pada setiap sub-babnya. Isi pembahasan dalam setiap bab saling menghubungkan ke bab berikutnya. Alhasil, semua bab yang terurai menghasilkan suatu karya tulis yang sistematis dan terorganisir.

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan struktur penulisan sebagai berikut

1. Halaman sampul, halaman judul, lembar pengesahan, surat pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, ucapan terima kasih, kata pengantar, dan daftar isi
2. Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran dan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
3. Bab II pembahasan/diskusi. Bagian ini meliputi: Kajian studi dari hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan kelanjutan penelitian ini. Agar terstruktur, bab ini akan mencakup:
 - a. Aspek historis
 - b. Analisa pola hubungan antar negara
 - c. Alur perkembangan konflik
4. Bab III hasil temuan terdiri dari uraian hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi temuan penelitian, yang membahas tentang: Mekanisme Shuttle Diplomacy, dan strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh Indonesia
5. Bab IV penutup, berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dilakukan